

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Permasalahan kemiskinan di Indonesia ini sudah sangat mendesak dan harus segera ditangani, masalah kemiskinan di Indonesia tercermin dari kondisi fisik masyarakat yang tidak memiliki akses sarana dan prasarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh dibawah standar kelayakan untuk di tempati serta mata pencaharian yang tidak menentu.<sup>2</sup> Dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menerangkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara, maka secara tidak langsung sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menjamin kehidupan masyarakatmiskin.<sup>3</sup>

Dari kewajiban yang sudah ditulis pada Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 pemerintah selalu memperhatikan permasalahan sosial ini. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran pemerintah, bahwa kegagalan mengatasi persoalan kemiskinan akan menyebabkan munculnya berbagai persoalan. Salah satu contoh sosial ekonomi yang berada di masyarakat adalah adanya kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin, berjaraknya antara orang yang berkuasa dan tidak berkuasa serta adanya orang yang dihormati dan tidak dihormati.

---

<sup>2</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Membangun Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005),hal. 131

<sup>3</sup> Hadi Prayitno, *Pembangunan Ekonomi Desa*.(Yogyakarta: BPFE, 1987), hal. 79

**Tabel 1.1**  
Jumlah Penduduk Miskin, Presentase Penduduk Miskin, dan Garis Kemiskinan di Indonesia Maret 2013 – September 2017

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)			Presentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
Maret 2013	10,33	17,74	28,07	8,39	14,32	11,37
September 2013	10,3	17,92	28,55	8,52	14,42	11,47
Maret 2014	10,1	17,77	28,28	8,34	14,17	11,25
September 2014	10,36	17,37	27,73	8,16	13,76	10,96
Maret 2015	10,65	17,94	28,59	8,29	14,21	11,22
September 2015	10,62	17,89	28,51	8,22	14,09	11,13
Maret 2016	10,34	17,67	28,01	7,79	14,11	10,86
September 2016	10,49	17,28	27,76	7,73	13,96	10,70
Maret 2017	10,67	17,10	27,77	7,72	13,93	10,64
September 2017	10,27	16,31	26,58	7,26	13,47	10,12

**Sumber:** *Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistika Di indonesia Tahun 2017*

Tabel ini membuktikan dari perkataan Erwan Agus Purwanto (2007) bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia sebagian berada di pedesaan, hal ini tidak terlalu mengejutkan karena selama ini program-program pembangunan yang dilaksanakan cenderung ke daerah perkotaan.<sup>4</sup>

Ketambahan juga propinsi Jawa Timur masuk ke dalam daerah yang memiliki jumlah penduduk tergolong miskin dan hampir merata disemua kabupaten. Disini bisa dilihat dari data yang diperoleh Badan Pusat Statistik di Jawa Timur bahwa Kabupaten Tulungagung mempunyai penduduk miskin yang masih ada di setiap tahunnya. Walaupun Kabupaten Tulungagung angka penduduk miskinnya tidak sebanyak di Kabupaten lainnya, akan tetapi di Kabupaten Tulungagung sendiri masih memiliki jumlah penduduk miskin.

---

<sup>4</sup>Erwan Agus Purwanto, Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* Volume 10 Nomor 3 Maret 2007, hal. 295-324

**Tabel 1.2**  
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten di Provinsi Jawa Timur  
Tahun 2013– 2017

Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin (000)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pacitan	91,70	88,90	92,08	85,53	85,26
Ponorogo	103,00	99,90	103,22	102,06	99,03
Trenggalek	92,80	90,00	92,17	91,49	89,77
<b>Tulungagung</b>	<b>91,70</b>	<b>89,00</b>	<b>87,37</b>	<b>84,35</b>	<b>82,80</b>
Blitar	120,30	116,70	114,12	113,51	112,93
Kediri	202,70	196,80	199,38	197,43	191,08
Malang	288,60	280,30	292,87	293,74	283,96
Lumajang	124,40	120,70	118,51	115,91	112,65
Jember	278,50	270,40	269,54	265,10	266,90
Banyuwangi	152,20	147,70	146,00	140,45	138,54
Bondowoso	115,30	111,90	113,72	114,63	111,66
Situbondo	90,30	87,70	91,17	89,68	88,23
Probolinggo	238,70	231,90	236,96	240,47	236,72
Pasuruan	175,70	170,70	169,19	168,06	165,64
Sidoarjo	138,20	133,80	136,13	136,79	135,42
Mojokerto	116,60	133,50	113,86	115,38	111,79
Jombang	137,50	133,30	133,75	133,32	131,16
Nganjuk	140,80	136,50	132,04	127,90	125,52
Madiun	83,70	81,20	84,74	85,97	83,43
Magetan	76,30	74,00	71,16	69,24	65,87
Ngawi	127,50	123,20	129,32	126,65	123,76
Bojonegoro	196,90	190,90	193,99	180,99	178,25
Tuban	196,90	191,10	196,59	198,35	196,10
Lamongan	192,00	186,10	182,64	176,92	171,38
Gresik	171,60	166,90	170,76	167,12	164,08
Bangkalan	218,30	212,20	216,23	205,71	206,53
Sampang	248,20	239,60	240,35	227,80	225,13
Pamekasan	153,70	148,80	146,92	142,32	137,77
Sumenep	225,50	218,90	216,84	216,14	211,92

**Sumber:** *Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistika di Indonesia Tahun 2017*

Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin.

Maka dari itu dibutuhkan metode yang efektif untuk mengatasi

masalah yang kompleks ini, salah satunya yaitu dengan adanya pemberdayaan masyarakat.<sup>5</sup> Pemberdayaan masyarakat ini pun merupakan suatu proses masyarakat, terutama masyarakat yang bisa dikatakan kurang mampu dan terabaikan. Salah satu alternatif yang digunakan untuk meratakan pendistribusian harta agar tidak terpusat kepada mereka yang kaya saja adalah dengan memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat menengah kebawah untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperbaiki perekonomian mereka.<sup>6</sup>

Melihat metode pemberdayaan masyarakat dinilai efektif, pemerintah Provinsi Jawa Timur memfokuskan untuk mengurangi masalah kemiskinan yang ada di desa melalui program Jalin Matra (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera) yang merupakan gagasan dari Gubernur Jawa Timur yaitu Soekarwo dan Saifulloh Yusuf, melalui program Jalin Matra Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri terbagi menjadi 3 jenis bantuan, diantaranya BRTSM (Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin, PFK (Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan) dan PK2 (Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan). Dari ketiga bantuan tersebut memiliki tujuan dan fungsi masing-masing dalam mengurangi tingkat kemiskinan diwilayah pedesaan.

Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang pedoman umum pelaksanaan Jalin Matra yang selalu di perbarui setiap tahunnya menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan Jalin Matra. Tidak hanya itu visi misi

---

<sup>5</sup> Abu Huraerah, *Pengorganisasiandan Pengembangan Masyarakat Model DanStrategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. (Bandung: Humaniora, 2011), hal. 187

<sup>6</sup> Totok Poerwoko, *Pemberdayaan Masyarakat dan Prespektif Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 76

program Jalin Matra pada intinya menginginkan masyarakat dapat hidup sejahtera dengan usaha yang mereka punya, dengan permasalahan kemiskinan yang selama ini diperkuat oleh beberapa faktor yang salah satunya permasalahan lapangan pekerjaan yang kurang, maka dari itu harapannya dengan berwirausaha masyarakat dapat mendirikan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri sehingga mampu mendukung kehidupannya untuk jangka panjang. Jalin Matra BRTSM dilakukan sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur, tujuannya yaitu agar kedalaman dan keparahan kemiskinan rumah tangga sangat miskin menurun.

Secara umum kemiskinan di Jawa Timur dapat di golongan menjadi 3 golongan yakni, pertama penduduk miskin yang hidup dibawah garis kemiskinan, kedua penduduk rentan (*vulnerable*) yakni penduduk yang hidup di atas garis kemiskinan akan tetapi mudah jatuh pada kemiskinan, ketiga Penduduk kesenjangan (*inequality*) yakni ketimpangan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota, desa dengan kota atau gender. Program Jalin Matra BRTSM memberikan bantuan khusus kepada rumah tangga yang berada pada Desil 1. Yang masuk dalam Desil 1 dapat di klarifikasikan sebagai rumah tangga miskin dan sangat miskin.

Berdasarkan Basis Data Terpadu Tahun 2015 (PBDT 2015) yang bersumber dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang memuat data mikro Provinsi Jawa Timur yang di peroleh melalui sensus berdasarkan nama dan alamat (*by name by address*) rumah

tangga dengan status kesejahteraan terendah menunjukkan hasil bahwa desil 1 (rumah tangga dengan status kesejahteraan 10% terendah) sebesar 1.095.350 rumah tangga. Dari kelompok desil 1 sebesar 1.095.350 rumah tangga, ditemukan kesejahteraan 5% terendah sejumlah 520.704 rumah tangga atau diklasifikasikan sebagai rumah tangga sangat miskin.<sup>7</sup> Tidak terkecuali di kabupaten Tulungagung.

Kabupaten Tulungagung sendiri terbagi menjadi 19 Kecamatan, 257 desa dan 14 kelurahan yang kemudian dipecah lagi dalam lingkup lingkup terkecil yaitu RT yang keseluruhannya mencapai 6.409 RT. Adapun kecamatan yang memiliki jumlah desa paling banyak adalah Kecamatan Gondang yang terdiri atas 20 desa. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Tanggunggunung dengan 7 desa. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. J

adi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Jumlah dan persebaran penduduk miskin di Kabupaten Tulungagung pada masing masing kecamatan diambil berdasarkan data yang terpakai. Berikut ini adalah data jumlah keluarga miskin di Kabupaten Tulungagung tahun 2015:

---

<sup>7</sup> Pedoman umum program JALIN MATRA Bantuan RTSM tahun 2017, hal. 5

**Tabel 1.3**  
Jumlah Penduduk Miskin per Kecamatan 2015

No	Nama Kecamatan	Jumlah Keluarga Miskin (KK)
1	Besuki	3.100
2	Bandung	3.532
3	Pakel	5.521
4	Campurdarat	5.091
5	Tanggunggunung	1.594
6	Kalidawir	5.384
7	Pucanglaban	2.203
8	Rejotangan	4.565
9	Ngunut	5.677
10	Sumbergempol	5.327
11	Boyolangu	5.568
12	Tulungagung	3.264
13	Kedungwaru	6.066
14	Ngantru	4.421
15	Karangrejo	4.237
16	Kauman	3.843
17	Gondang	4.197
18	Pagerwojo	2.665
19	Sendang	3.743
	Jumlah	79.998

**Sumber:** Website Bappeda Tulungagung, RPI2JM Bidang PU Cipta Karya Tulungagung

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah penduduk miskin terbesar berada di Kecamatan Kedungwaru yaitu sebanyak 6.066 KK yang kemudian disusul oleh Kecamatan Ngunut sebesar 5.677 KK. Adapun Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk miskin paling sedikit adalah Kecamatan

Tanggunggunung berjumlah 1.594, hal ini disebabkan karena kecamatan tanggunggunung memiliki jumlah penduduk paling sedikit dibanding kecamatan lainnya.<sup>8</sup>

Melihat kondisi ekonomi di Kabupaten Tulungagung sendiri, masyarakat masih membutuhkan bantuan dari pemerintah, yaitu mengurangi jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Tulungagung.

**Tabel 1.4**  
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2013-2018

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah	Presentase
2013	269 290	91 300	9,03
2014	277 707	88 990	8,75
2015	292 483	87 370	8,57
2016	304 518	84 350	8,23
2017	314 532	82 800	8,04
2018	328 640	75 230	7,27

*Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistika Kabupaten Tulungagung Tahun 2017*

Berdasarkan data tabel 1.4 bahwa tahun 2017 angka kemiskinan di Kabupaten Tulungagung sebesar 8,04 persen dan pada tahun 2018 turun menjadi 7,27 persen. Meskipun pada tahun 2018 angka kemiskinan di Kabupaten Tulungagung menurun, akan tetapi kepedulian untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan terbebas dari kemiskinan akan tetap berlangsung melalui berbagai upaya dan inovasi untuk penanggulangan kemiskinan di kabupaten Tulungagung.

Dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung ada 4 desa yang memperoleh bantuan RTSM tahun 2018 yaitu

---

<sup>8</sup> Bappeda.tulungagung.go.id, diakses tanggal 27 Agustus 2020



Desa Blimbing Kecamatan Rejotangan, Desa Gedangan Kecamatan Campurdarat, Desa Pakisrejo Kecamatan Tanggunggunung, dan Desa Balesono Kecamatan Ngunut. Keinginan dari pemerintah Kabupaten Tulungagung bantuan RTSM ini dapat dimanfaatkan dan dibuat untuk mengembangkan usaha, sehingga bantuan yang telah diberikan bermanfaat optimal secara ekonomi.<sup>9</sup>

Penulis hanya meneliti satu dari empat desa yang mendapatkan bantuan RTSM, yaitu Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Dimana desa tersebut merupakan desa yang mendapatkan bantuan RTSM paling banyak berupa barang modal usaha daripada binatang ternak. Di Desa Balesono sendiri terdapat 15 kepala rumah tangga yang mendapatkan bantuan RTSM, dari ke 15 RTS tersebut 8 kepala rumah tangga sasaran memilih untuk meminta bantuan barang berupa barang-barang untuk usaha berdagang atau wirausaha. Dan sisanya 7 kepala rumah tangga sasaran memilih untuk meminta bantuan barang berupa binatang ternak seperti kambing.

Disinilah peneliti merasa ada keunikan tersendiri terkait wujud barang bantuan dan kesadaran masyarakat. Desa Balesono sendiri merupakan kawasan ladang dan juga persawahan, meskipun begitu tidak menjadikan bertani sebagai mata pencarian utama. Tidak hanya itu di desa Balesono juga terdapat masyarakat yang memanfaatkan tanahnya untuk membuat kolam ikan. Melihat data di atas dengan kawasan ladang dan sawah yang

---

<sup>9</sup> [dpmd.tulungagung.go.id](http://dpmd.tulungagung.go.id) diakses tanggal 27 Agustus 2020

terbilang luas dan juga subur bisa menjadi alasan kuat para penerima RTS untuk meminta bantuan berupa binatang ternak. Tetapi uniknya mereka lebih banyak meminta bantuan berupa barang usaha, baik itu berupa barang pertokoan, barang usaha mandiri dan juga lainnya. Melihat fenomena tersebut tentu ada kesadaran mandiri dari penerima RTS di Desa Balesono, mereka menganggap dengan dirupakan modal usaha ada keyakinan dan harapan untuk modal masa depannya, serta bisa menjadikan mereka mandiri.

Berdasarkan dari program yang telah dilakukan oleh Pemerintah Jawa Timur mengenai pemberdayaan masyarakat desa dalam memberikan perubahan perekonomian masyarakat dan mengatasi masalah kemiskinan, serta memberikan peluang usaha untuk wilayah Jawa Timur melalui program Jalin Matra, dalam hal ini adalah Jalin Matra BRTSM (Bantuan Tangga Sangat Miskin) maka penulis akan membahas secara lebih jauh dan mendalam dengan judul **“Perubahan Perekonomian dan Peluang Usaha Bagi Masyarakat Dengan Adanya Program Jalin Matra BRTSM di Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Tahun 2018”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan keterangan pada latar belakang, maka beberapa permasalahan muncul dan ditarik dalam fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perubahan ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan di Desa Balesono melalui program Jalin

Matra BRTSM KabupatenTulungagung?

2. Bagaimana peluang usaha masyarakat sesudah mendapatkan bantuan di Desa Balesono melalui program Jalin Matra BRTSM KabupatenTulungagung?
3. Bagaimana kendala yang terjadi di lapangan dalam menerapkan program Jalin Matra BRTSM di Desa Balesono KabupatenTulungagung?
4. Bagaimana solusi untuk menghadapi kendala yang terjadi di lapangan dalam menerapkan program Jalin Matra di Desa Balesono Kabupaten Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan perubahan ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan di Desa Balesono melalui program Jalin Matra BRTSM KabupatenTulungagung?
2. Untuk mendeskripsikanpeluang usaha masyarakat sesudah mendapatkan bantuan di Desa Balesono melalui program Jalin Matra BRTSM KabupatenTulungagung?
3. Untuk mendeskripsikan kendala yang terjadi di lapangan dalam menerapkan program Jalin Matra BRTSM di Desa Balesono KabupatenTulungagung?
4. Untuk mendeskripsikan solusi untuk menghadapi kendala yang terjadi di lapangan dalam menerapkan program Jalin Matra di Desa Balesono Kabupaten Tulungagung?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian tentang “Evolusi Perekonomian dan Peluang Usaha Bagi Masyarakat Dengan Adanya Bantuan Program Jalin Matra BRTSM di Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Tahun 2018” diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan semua pihak yang bersangkutan.

##### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemikiran agar menambah wawasan pengetahuan dalam pemberdayaan masyarakat desa melalui program Jalin Matra BRTSM, dimana terdapat perubahan yang lebih baik lagi dalam perekonomian rumah tangga miskin dan daya usaha bagi rumah tangga yang mendapatkan bantuan BRTSM serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

##### 2. Manfaat praktis

- a. Bagi Akademik, diharapkan dapat memperbanyak buku-buku tentang pemberdayaan masyarakat di kepustakaan IAIN Tulungagung.
- b. Bagi Lembaga Pemerintah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran, dalam hal ini dapat dijadikan acuan evaluasi program Jalin Matra BRTSM untuk kedepannya.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat membantu masyarakat untuk memahami tentang program bantuan Jalin Matra BRTSM dimana

program ini adalah program Pemerintah Jawa Timur dengan berupa bantuan barang dan bantuan tersebut sifatnya produktif.

- d. Bagi Peneliti Lanjutan, penelitian ini dapat dijadikan acuan atau pedoman untuk penelitian selanjutnya.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam memahami judul proposal penelitian, maka dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut :

### 1. Secara Konseptual:

#### a. Perubahan Ekonomi

Kuznet, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemaju teknologinya dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan<sup>10</sup>.

#### b. Peluang Usaha

Menurut Robbin dan Coulter, peluang usaha adalah sebuah proses yang melibatkan individu atau kelompok yang menggunakan usaha dan sarana tertentu untuk menciptakan suatu nilai tambah guna memenuhi sebuah kebutuhan tanpa memperhatikan sumber daya yang digunakan.<sup>11</sup>

#### c. Pemberdayaan Masyarakat Desa

---

<sup>10</sup>Zulfa Ulin Nuha, *Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Muslim di Kabupaten Blitar*. (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), hal. 30-31

<sup>11</sup>Stephen Robbins dan Mary Coulter, *Manajemen*. (Jakarta: PT Indeks, 2007), hal 54

Upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, pendampingan, yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.<sup>12</sup>

- d. Jalin Matra: Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera
- e. BRTSM: Salah satu program dari JalinMatra yakni Bantuan Rumah Tangga SangatMiskin

2. Secara Operasional:

- a. Perubahan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dari pendapat Prof. Simon Kuznet.
- b. Peluang usaha bisa diartikan sebagai sebuah kesempatan yang akan didapatkan oleh orang demi mendapatkan tujuan dengan cara melakukan sebuah usaha yang akan memanfaatkan berbagai macam sumber daya yang dimiliki. Dalam hal ini peluang usaha menjadi hal

---

<sup>12</sup> bumdes.id/ diakses tanggal 3 Mei 2020

yang paling penting untuk melakukan sesuatu bisnis dari kesempatan yang diberikan. Hal ini menambahkan pendapat dari Robbin dan Coulter terkait peluang usaha demi mewujudkan kesejahteraan bersama.

- c. Pemberdayaan masyarakat dan desa sendiri adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk melalui proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan ini akan bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Hal ini senada dengan cita-cita Badan Usaha Milik Desa dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Dalam prakteknya yang terkandung dalam penelitian yang berjudul Perubahan Ekonomi dan Peluang Usaha Bagi Masyarakat Dengan Adanya Program Bantuan Jalin Matra BRTSM Di Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Tahun 2018, pemberdayaan merupakan usaha atau ikhtiar orang atau badan untuk membantu seseorang/badan untuk meningkatkan kesejahteraan. Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (BRTSM) ialah salah satu jenis program bantuan Jalin Matra dari Pemerintah Jawa Timur untuk mengatasi masalah kemiskinan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi – materi yang tertera pada laporan Skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian teori bab ini berisikan kajian fokus pertama, kajian fokus kedua dan seterusnya, dan hasil penelitian terdahulu.

BAB III Metode penelitian bab ini berisi pendekatan dan jenis penelitian, tempat penelitian, instrumen penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap – tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian bab ini berisi paparan data yang terkait dengan tema skripsi yang didapatkan melalui metode-metode yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Pada bab ini menguraikan mengenai deskripsi tempat obyek penelitian serta paparan data dan temuan dalam penelitian.

BAB V Pembahasan bab ini menguraikan pembahasan lebih dalam terkait data hasil penelitian yang di dapatkan dari tempat penelitian dan dikaji dengan teori yang telah di uraikan pada bab sebelumnya.

BAB VI Penutup bab ini adalah bab terakhir dalam skripsi yang menunjukkan pokok penting dari semua pembahasan, yang mana pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait penelitian.